



PROVINSI PAPUA

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA



Jalan Diponegoro No. 63 Jayapura  
Telp. (0967) 537214 – 537215  
Website : [papua.bnn.go.id](http://papua.bnn.go.id)  
E-Mail : [bnp\\_papua@bnn.go.id](mailto:bnp_papua@bnn.go.id)

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 dengan tepat waktu.

Pelaksanaan tugas, pokok, fungsi dalam implementasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang sekarang direvisi dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2013. Pelaksanaan P4GN di satuan kerja BNNP Papua telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi dalam merencanakan dan melaksanakan program P4GN di Provinsi Papua pada tahun selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat mencapai target kinerja yang diinginkan. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja di satker BNNP Papua. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk rekapitulasi data di tingkat nasional untuk pembuatan LAKIP BNN RI dan sebagai bahan penyusunan implementasi rencana kerja dan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Jayapura, 02 Januari 2024



Norman Widjajadi, S.I.K

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
11	
A. Latar Belakang .....	11
B. Dasar Hukum .....	13
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.....	13
D. Struktur Organisasi .....	17
E. Sistematika Penyajian .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA</b> .....	22
A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2023 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
1. Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika .....	27
2. Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika .....	28
3. Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN...	28
4. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan I .....	30
5. Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan II .....	30
6. Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika...	31
7. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi .....	32

8. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi.....	32
9. Meningkatnya Aksebilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi.....	33
10. Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.....	34
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika.....	34
12. Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya II.....	36
13. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika I.....	37
14. Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika II.....	40
15. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien I.....	40
16. Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien II.....	41
17. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur I.....	44
18. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Yang Sesuai Prosedur II.....	45
19. Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal.....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>48</b>

## **Executive Summary ( Ikhtisar Eksekutif )**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) di daerah. BNNP Papua berkedudukan di Ibukota Provinsi Papua, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP Papua mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 64), Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNNP Papua melaksanakan tupoksi dan wewenang BNN di daerah Provinsi Papua dimana dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 terdapat 5 (lima) pilar utama dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk mengimplementasikan Program P4GN, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) BNN Tahun 2015-2019. BNNP Papua melaksanakan 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut ringkasan singkat capaian dari setiap indikator kinerja utama.

### **Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah kabupaten / kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” diwilayah provinsi.** Target yang diberikan adalah 3 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 3 Kabupaten/Kota yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai sebanyak 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi**. Target yang diberikan adalah 2 Kabupaten/Kota. Target tersebut telah tercapai 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura.

## **Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Target yang diberikan adalah 1 Kawasan. Target tersebut telah tercapai 1 Kawasan Rawan yaitu Kampung Skow Sae Distrik Muaratami Kota Jayapura

## **Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan sebesar 2.47 indeks. Lifeskill di Kelurahan Skow Sae adalah Pembuatan Kerajinan Batok Kelapa. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi adalah 3,02 Indeks

### **Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup**. Target yang diberikan adalah 85 %. Target tersebut telah tercapai 100 %

### **Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih**. Target yang diberikan adalah 30 Orang untuk petugas rehabilitasi penyelenggara layanan IBM yang terlatih. Target tersebut telah tercapai 35 orang terdiri dari 15 orang BNNP, 10 orang BNNK Jayapura, dan 10 orang BNNK Mimika

### **Sasaran Kegiatan 8 : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis**. Target yang diberikan adalah 6 orang. Target tersebut telah tercapai sebanyak 8 orang

### **Sasaran Kegiatan 9 : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi**. Target yang diberikan adalah 1 lembaga dan tercapai 1 lembaga yaitu Puskesmas Ely Uyo.

### **Sasaran Kegiatan 10 : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional**. Target yang diberikan

adalah 6 unit. Target tersebut terealisasi 6 terdiri dari 2 BNNP Papua, BNNK Jayapura, dan 2 BNNK Mimika.

#### **Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN**. Target yang diberikan 3.3 Indeks. Target tersebut telah tercapai

#### **Sasaran Kegiatan 12 : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang P-21**. Target yang diberikan adalah 10 Berkas Perkara. Target tercapai 13 Berkas Perkara terdiri dari 9 LKN BNNP Papua, 2 LKN BNNK Jayapura, dan 2 LKN BNNK Mimika.

#### **Sasaran Kegiatan 13 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan**. Target yang diberikan yaitu 100 %. Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

#### **Sasaran Kegiatan 14 : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika**. Target yang diberikan yaitu 100 % dan Target tersebut telah tercapai sebesar 100 %.

### **Sasaran Kegiatan 15 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 85 Indeks untuk nilai kinerja BNNP Papua. Untuk BNNP Papua tidak mencapai target yaitu sebesar 78.02 Sedangkan untuk BNNK Jayapura sebesar 86,27 dan BNNK Mimika sebesar 54.05. BNNK Jayapura berhasil melebihi target sedangkan BNNK Mimika tidak mencapai target.

### **Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target**. Target 2 BNN Kabupaten/Kota. Untuk tahun ini hanya tercapai 1 BNNK saja yaitu BNNK Jayapura yaitu nilai NKA nya adalah 86,27 dari target 82 Indeks.

### **Sasaran Kegiatan 17 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua**. Target yang diberikan yaitu 92 Indeks untuk nilai IKPA BNNP Papua. Untuk BNNP Papua telah melebihi target yaitu nilai IKPA nya sebesar 96.68 %.

### **Sasaran Kegiatan 18 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target**. Target yang diberikan yaitu 2 BNN Kabupaten/Kota yang nilai IKPA nya mencapai target. Untuk BNNP Papua telah melebihi target yaitu nilai IKPA nya sebesar 96.87. Sedangkan untuk BNNK Jayapura sebesar 96.10 dan BNNK Mimika sebesar 95.64. Kedua BNNK tersebut juga telah melebihi target yang ditetapkan.

**Sasaran Kegiatan 19 : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal**

Sasaran ini memiliki 1 indikator kinerja kegiatan yaitu **Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal** Target yang diberikan yaitu 75 Indeks. Untuk BNNP Papua tahun 2023 tidak mencapai target dengan nilai IKPA nya hanya sebesar 71,46 Indeks.

# **BAB**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Provinsi Papua terletak di ujung timur wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Papua New Guinea. Provinsi Papua terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota dimana terdapat 5 (lima) kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Hasil penghimpunan informasi dari informan BNNP Papua dapat disimpulkan bahwa cukup banyak peredaran ganja yang masuk ke Provinsi Papua dengan memanfaatkan daerah perbatasan. Peredaran ganja yang tidak dalam pengawasan pemerintah sangat berbahaya bagi generasi muda dan masyarakat Papua. Pemerintah beserta masyarakat harus bergandengan tangan untuk memerangi penyalahgunaan ganja dan jenis narkoba lain yang dapat merusak bangsa. Penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan memperkuat kelembagaan BNN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penguatan kelembagaan dimaksud adalah pengembangan kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). BNNP Papua dibentuk untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BNN di Provinsi Papua.

BNNP Papua melaksanakan P4GN di Provinsi Papua dengan melakukan pencegahan melalui diseminasi informasi dan advokasi, melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternative dan peningkatan peran serta masyarakat, serta rehabilitasi dan program pasca rehabilitasi. Melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba melalui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan asset serta bidang hukum dan kerjasama melalui hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum.

BNNP Papua tidak dapat melakukan P4GN tanpa melibatkan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di Provinsi Papua . Hal ini sejalan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2015-2019. Inpres tersebut menugaskan kepada seluruh pimpinan kementerian/ lembaga/ instansi pusat dan daerah, berperan serta melakukan program P4GN sesuai dengan fungsi yang ada pada kementerian/ lembaga/ instansi masing-masing.

BNNP Papua dalam menjalankan tugasnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh sebab itu perlu adanya ketransparansian dalam penggunaannya. Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019 BNNP Papua berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Papua. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 388 Tahun 2015 Tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan BNN Republik Indonesia

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.**

### **1. Kedudukan.**

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN

### **2. Tugas.**

Tugas BNNP Papua adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Papua antara lain:

- a. Melaksanakan kebijakan Nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

### **3. Fungsi.**

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Papua menyelenggarakan fungsi BNN di Provinsi Papua:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP Papua.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
- f. Mengikuti pembinaan teknis dibidang P4GN.
- g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.
- h. Mengikuti penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
- m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
- p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
- u. Pelaksanaan pengujian Narkoba.
- v. Pengembangan laboratorium uji Narkoba.
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **4. Kewenangan.**

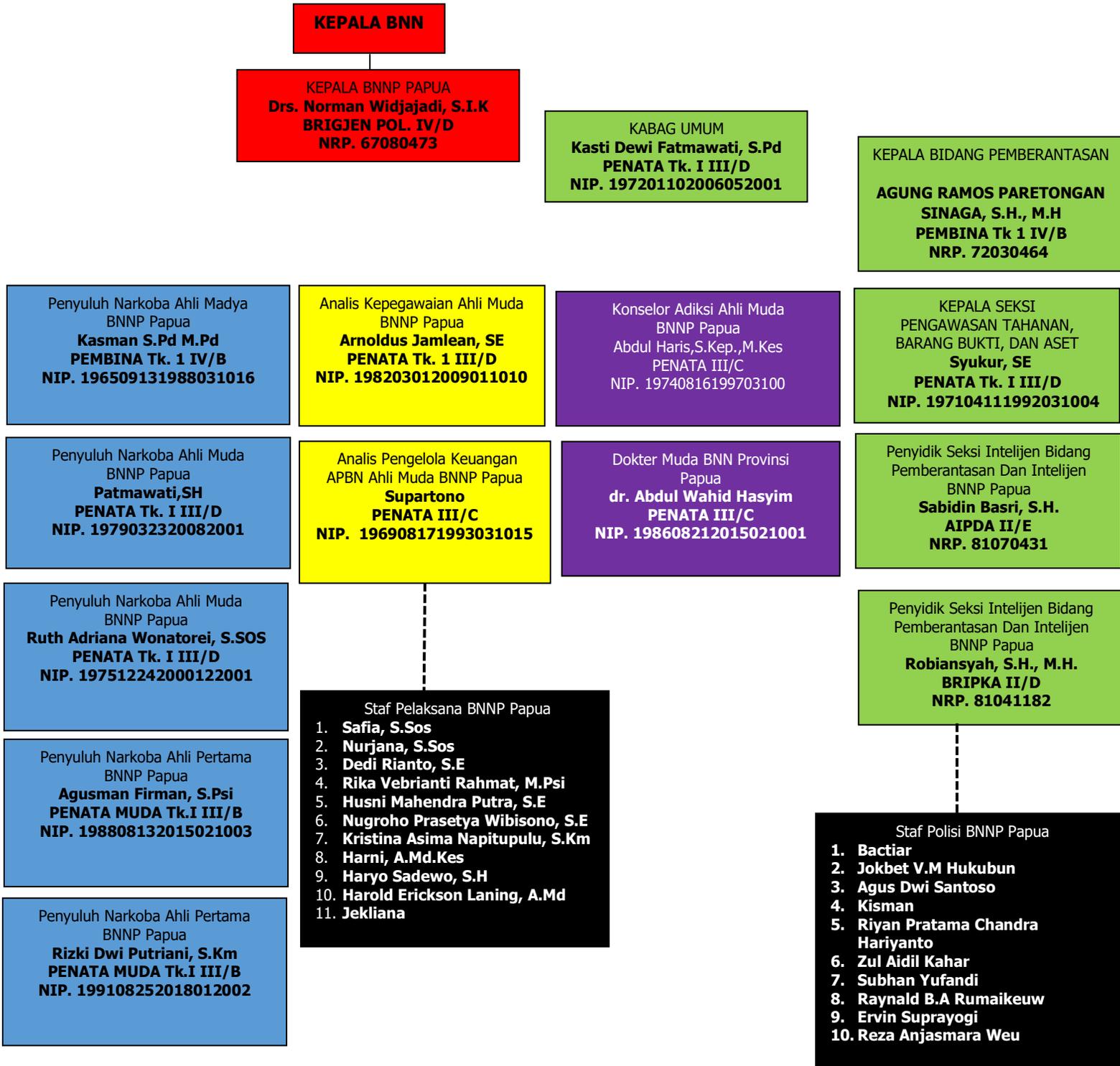
Kewenangan BNNP Papua secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP Papua berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Papua.

#### **D. Struktur Organisasi.**

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNNP Papua
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pemberantasan

## STRUKTUR ORGANISASI BNNP PAPUA T.A 2023



## Daftar Nama Pegawai BNN Provinsi Papua Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>N A M A NIP / NRP</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>JABATAN/ ESELON</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6
1	Drs. RAHMAT HIDAYAT 65060738	Brigjen.Pol/ IV-D	Ka. BNNP II.a	S1	L
2	Dra. MAQDALENA 19650830 199202 2 001	Pembina Tk. I/ IV-B	Kabag. Umum III.a	S1 Kessos	P
3	AGUNG RAMOS PARETONGAN SINAGA, S.H., M.H 72030464	Kombes.Pol/ IV-B	Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Papua	S2 Hukum	L
4	KASMAN, S.Pd; M.Pd. 19800519 200212 1 006	Pembina/ IV-A	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S2 Pendidikan	L
5	DUDI MULYADI, SH, MH 19800418 200501 1 002	Pembina/ IV-A	Perencana Ahli Muda BNNP Papua	S2 Hukum	L
6	KASTI DEWI FATMAWATI, S.Pd. 19720110 200605 2 001	Penata Tk.1/ III-D	Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Papua	S1. Pendidikan	P
7	PATMAWATI, SH 19790323 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Hukum	P
8	RUTH A. WONATOREI, S.Sos. 19751224 200012 2 001	Penata/III-C	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNP Papua	S1. Sosiologi	P
9	ARNOLDUS JAMLEAN, SE 19820301 200901 1 010	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Kepegawaian Ahli Muda BNNP Papua	S1 Ekonomi	L
10	ABDUL HARIS, S.Kep.,M.Si. 19740816 199703 1 003	Penata/III-C	Konselor Adiksi Ahli Muda BNNP Papua	S2 Kesehatan	L
11	SUPARTONO 19690817 199303 1 015	Penata/III-C	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda BNNP Papua	SLTA	L
12	SAFIA, S.Sos. 19790118 200008 2 001	Penata Tk. 1/ III-D	Analisis Data Dan Informasi BNN Provinsi Papua	S1 Adm.Negara	P
13	SYUKUR, SE 19710411 199203 1 004	Penata Tk. 1/ III-D	Kepala Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1 Ekonomi	L
14	NURJANA, S.Sos 19751028 200701 2 020	Penata/III-C	Analisis Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Papua	S1 Sosial	P
15	dr. ABDUL WAHID HASYIM 19860821 201502 1 001	Penata/III-C	Dokter Muda BNN Provinsi Papua	S1 Kedokteran	L
16	DEDI RIAN TO, SE 19900603 201502 1 002	Penata Muda Tk.I/III-B	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan BNN Provinsi Papua	S1. Ekonomi	L
17	AGUSMAN FIRMAN, S.Psi. 19880813 201502 1 003	Penata Muda Tk.I/III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1. Psikologi	L
18	RIZKI DWI PUTRIANI, S.KM 19910825 201801 2 002	Penata Muda/ III-B	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan Masyarakat	P

19	RIKA VEBRIANTI RAHMAT, M.Psi 19880209 201902 2 003	Penata Muda Tk.I/III-B	Psikolog Klinis Pertama BNN Provinsi Papua	S2 Psikologi	P
20	HUSNI MAHENDRA PUTRA, SE 19910808 202012 1 008	Penata Muda/ III-A	Pengelola Keuangan BNN Provinsi Papua	S1 Ekonomi	L
21	HARYO SADEWO, S.H 19920510 201801 1 002	Penata Muda/ III-A	Penyidik BNN Ahli Pertama	S1 Hukum	L
22	NUGROHO P.WIBISONO, A.Md 19920723 201502 1 001	Pengatur TK. I/ II-D	Pengelola Keuangan BNN Provinsi Papua	D3. Manajemen Informatika	L
23	HARNI, A.Md.Kes	Penata Muda / III-A	Pengelola Data Bagian Umum BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
24	KRISTINA ASIMA NAPITUPULU, S.KM	Penata Muda / III-A	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial BNN Provinsi Papua	S1 Kesehatan	P
25	HAROLD ERICKSON LANING, A.Md	Pengatur TK. I/ II-D	Pengelola Data Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	D3 Farmasi	L
26	JEKLIANA 19881024 201104 2001	Pengatur /II-C	Pengadministrasi Umum Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SMA	P
27	SABIDIN BASRI, SH 81070431	Aipda/ II-E	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Hukum	L
28	BACHTIAR 78011039	Bripka/ II-D	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
29	JOKBET V.M. HUKUBUN 84100861	Bripka/ II-D	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	P
30	ROBIANSYAH, S.Sos. I 81041182	Brigpol/ II-C	Penyidik Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	S1. Sosial Islam	L
31	KISMAN 87040073	Bripka/ II-D	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
32	AGUS DWI SANTOSO 92080569	Briptu/II-B	Petugas Pengejaran Seksi Intelijen Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
33	RIYAN PRATAMA CHANDRA HARIYANTO 98110180	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L

34	SUBHAN YUFANDI 97030459	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
35	ZUL AIDIL KAHAR 98040305	Bripda/II-A	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
36	REZA ANJASMARA WEU 94091228	Briptu/II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
37	ERVIN SUPRAYOGI 96010743	Briptu/II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L
38	RAYNALD BENNY ANDIKA RUMAIKEUW	Briptu/II-B	Penjaga Tahanan Seksi Pengawasan Tahanan Dan Barang Bukti Bidang Pemberantasan Dan Intelijen BNN Provinsi Papua	SLTA	L

#### **E. Sistematika Penyajian.**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibidang Pencegahan P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I     Pendahuluan.

Bab II    Perencanaan dan Penetapan Kinerja.

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV    Penutup.

Lampiran-Lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Penyusunan perjanjian kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PK adalah wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. PK menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Pihak pihak yang melaksanakan PK meliputi Pemimpin Kementerian/ Lembaga, Pimpinan Unit Organisasi mulai eselon I, II, III, dan IV, Pimpinan Satuan Kerja Vertikal, Pimpinan Unit Kerja Mandiri hingga level individu yang menjadi anggota organisasi. Dokumen PK terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Pernyataan perjanjian kinerja terdiri dari pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu yang ditandatangani pihak yang berjanji / sepakat, sedangkan Lampiran Perjanjian Kinerja berisi informasi kinerja yang diperjanjikan terdiri atas variabel sasaran, indikator, dan target. Variabel dalam Lampiran PK inilah yang menjadi sumber acuan dalam konteks penyusunan LKIP setiap unit organisasi.

Visi misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

**Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :**

***“Mewujudkan masyarakat Provinsi Papua yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua menetapkan misi Organisasi sebagai berikut :

**Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua :**

***“Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Provinsi Papua dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba”.***

## A. Penetapan Kinerja BNNP Papua Tahun 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja BNNP Papua Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3	Kabupaten/Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,47	Indeks

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	85	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30	Orang
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	6	Orang
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1	Lembaga
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional 2 skouw sae dan skouw yambe	6	Unit
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN,	3,3	Indeks
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	10	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	Indeks
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	85	Indeks
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2	Kabupaten/Kota

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	Indeks
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	Kabupaten/Kota
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75	Indeks

### **DIPA BNNP PAPUA T.A 2023**

No.	Kode Output	Indikator Output	Pagu
1	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40,000,000
2	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	70,000,000
3	3248.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	130,000,000
4	3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	50,000,000
5	3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	47,680,000
6	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	262,782,000
7	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	62,900,000
8	3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	54,100,000
9	3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	93,350,000
10	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	23,740,000
11	3259.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	262,500,000
12	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	149,250,000
13	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	140,782,000
14	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	62,126,000
15	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	730,000,000
16	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	130,000,000
17	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,696,968,000
18	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,500,000
19	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	53,440,000
20	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	97,376,000
21	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,367,833,000
22	3239.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,000,000
23	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	32,052,000
<b>Jumlah Total</b>			

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan kegiatan untuk mencapai kinerja, melakukan berbagai upaya yaitu melalui perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan.

Pada Tahun 2023 BNNP Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran kinerja / kegiatan, dengan indikator kinerja sebanyak 19 (sembilan belas).

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Papua selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNNP Papua Tahun 2023, BNNP Papua akan menggunakan data hasil survei kerjasama antara Puslitdatin BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia, namun dalam penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah data / hasil survey belum kami terima, data tersebut kami harap segera kami terima sebagai dasar perhitungan untuk menentukan prosentase capaian dengan pertimbangan karakteristik daerah yang menjadi lokasi monitoring memiliki kerawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan telah aktif melakukan program P4GN. Hasil perumusan atas pelaksanaan survei tersebut dijadikan sebagai data pembanding dalam evaluasi capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

# 1

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten /Kota	100 %

Untuk Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi Papua, tahun 2023 ini mendapatkan target 3 Kabupaten/Kota yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. Nilai Dektari kedua Kabupaten tersebut berkategori tinggi dengan nilai sebagai berikut :

BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA</b>	<b>49.66</b>	<b>Rendah</b>

Secara agrerate nasional BNNP Papua mendapatkan peringkat 32 nilai Dektari dari 34 provinsi dengan nilai agregate 49.66 kategori “Rendah”. Padahal untuk penilaian individu BNNP Papua dan BNNK Mimika memperoleh nilai Dektari kategori “Tinggi” yaitu 52.63 dan 52.88. Ini disebabkan karena nilai Dektari BNNK Jayapura berkategori “Rendah” yaitu 43.47. Tabel ini menunjukkan bahwa tahun 2023 BNNP Papua dan

jajarannya terjadi penurunan nilai Dektari yang di tahun 2022 mempunya skor nilai 52.33 sedangkan tahun 2023 hanya 49.66.

2	<p><b>Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika</b></p>
---	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi.	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100 %

204	<b>BNNP PAPUA</b>	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI

Dari tabel di atas, terlihat indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba di Provinsi Papua tahun 2023 dikategorikan “Tinggi” dengan nilai akumulasi 85,74 (Tinggi). Terlihat indeks 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura dengan nilai 88.036 (Tinggi) dan Kabupaten Mimika dengan nilai 87.321 (Tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua secara agregat tingkat kesadaran akan bahaya narkoba dilingkungan keluarga termasuk Tinggi. Artinya outcome dari kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) yang dilakukan BNNP Papua, BNNK Jayapura dan BNNK Mimika kepada masyarakat sudah sangat berhasil dan memberikan dampak positif.

# 3

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi . Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kabupaten/Kota Dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %

### Laporan Angka Indeks Kemandirian Partisipasi (Capaian Outcome)

#### Tahun 2023

NO	JENIS BANG PAS YANG DILAKSANAKAN	NILAI IKP PENGGIAT ANTI NARKOBA			JUMLAH		
		BNNP PAPUA	BNNK JAYAPURA	BNNK MIMIKA	TOTAL	DIBAGI $\Sigma$ BNN	NILAI IKM
1.	LINGKUNGAN KERJA PEMERINTAH	3,19	3,14	3,23	9,56	9,56/3	3,19
2.	LINGKUNGAN KERJA SWASTA	-	-	-	-	-	-
3.	LINGDIK FORMAL & NON FORMAL	3,22	3,28	3,23	9,73	9,73/3	3,24
4.	LINGKUNGAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-
	RATA-RATA JUMLAH NILAI DIBAGI 4	6,41	6,42	6,46	19,29	19,29/6	6,43
	<b>NILAI IKP</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>	<b>3,23</b>			<b>3,21</b>

# 4

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” dan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Kawasan Rawan di Wilayah Provinsi yang Beralih Status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada”	1 Kawasan	1 Kawasan	100 %

Untuk kawasan rawan di wilayah Provinsi Papua yang beralih status dari “Bahaya” Menjadi “Waspada” tahun 2023 adalah Kampung Skow Sae Distrik Muaratami Kota Jayapura, dengan lifeskill atau jenis pelatihan di Kampung Skouw Sae adalah Pembuatan Souvenir Batok Kelapa.

Jumlah Kawasan/Wilayah Rawan Narkoba yang Diintervensi Program PEMBERDAYAAN ALTERNATIF					
Satker	Nama Kawasan	Jenis Lifeskill	Faktor Pokok	Faktor Pendukung	Keterangan
BNNP Papua	Kampung Skouw Sae	Pembuatan Souvenir Batok Kelapa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kejahatan Tinggi</li> <li>2. Angka Pengguna Narkoba</li> <li>3. Barang Bukti Narkoba</li> <li>4. Kurir Narkoba</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hunian dengan privacy tinggi</li> <li>2. Ketiadaan sarana publik</li> <li>3. Rendahnya interaksi sosial masyarakat</li> </ol>	Kota Jayapura

# 5

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan Atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah *Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	2.47 %	3,02	122.2 %

Nilai yang menjadi patokan adalah kawasan rawan yang diintervensi di wilayah Kampung Skow Sae Distrik Muaratami Kota Jayapura. Tahun 2023 BNNP Papua mampu melebihi target pusat yaitu sebesar 3,02 %.

	NO	KODE	SATUAN KERJA VERTIKAL	TARGET INDIKATOR DIREKTORAT DAYATIF		TARGET INDIKATOR BNN PROVINSI			
				Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada" Satuan: Kawasan		TARGET INDIKATOR 1 Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" Satuan: Kawasan		TARGET INDIKATOR 2 Nilai Keterpulihan Kawasan Satuan: Angka (Cat: Penilaian dilakukan per kawasan yang diintervensi)	
				CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2023	BARGAIN 2024	CAPAIAN 2023	BARGAIN 2024
203	196	689842	BNN Kota Kupang						
204	197	689859	BNN Kabupaten Rote Ndao						
205	198	682715	<b>BNN Provinsi Gorontalo</b>			2	1	3,24	3,25
206	199	419263	BNN Kabupaten Boalemo						
207	200	689781	BNN Kota Gorontalo						
208	201	689795	BNN Kabupaten Bone Bolango						
209	202	310153	BNN Kabupaten Gorontalo						
210	203	310721	BNN Kabupaten Gorontalo Utara						
211	204	682757	<b>BNN Provinsi Papua</b>			1	-	3,02	-
212	205	419286	BNN Kabupaten Mimika						
213	206	689067	BNN Kabupaten Jayapura						

# 6

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Persentase Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	85 %	100 %	117,6 %

Untuk Persentase Penyalahguna Dan/Atau Pecandu Narkotika Yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup , sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 85 % . Dari target tersebut BNNP Papua mampu mencapai angka sempurna yaitu 100 % . Sedangkan untuk BNNK Jayapura dan BNNK Mimika masing-masing mendapatkan angka peningkatan kualitas hidup sebesar 69,44 % dan 35,00 %.

	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
<b>Papua</b>	<b>3,38</b>	<b>3,7</b>	<b>75.00</b>
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00

# 7

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	30 Orang	35 Orang	116 %

Untuk Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih sesuai PK 2023 BNNP Papua dan jajaran BNNK nya mendapatkan target 30 orang. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan 15 orang, BNNK Jayapura 10 orang dan BNNK Mimika 10 orang. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 116 %. Alasan faktor yang membuat kita over prestasi atau melebihi target karena puskesmas dan rumah sakit yang menjalin kerjasama dengan Bidang Rehabilitasi BNNP Papua sangat mendukung rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba. Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjadi mitra BNNP juga antusias mengirimkan tenaga kesehatan yang ditugaskan untuk menangani korban penyalahguna narkoba di masyarakat untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi petugas rehabilitasi.

<b>8</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi</b>
----------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi* . Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	6 Orang	8 Orang	133,3 %

Untuk Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 6 Orang. Dari target tersebut BNNP Papua mampu

mendapatkan 8 orang yang dididik untuk menjadi tenaga teknis rehabilitasi di BNNP Papua.

**9**

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %

Untuk Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi adalah Puskesmas Ely Uyo sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 1 Lembaga. Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

**10**

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional	6 Unit	6 Unit	100 %

Untuk *Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional* sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 6 Unit. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mencapai target 100 % yang terdiri dari 2 unit IBM di BNNP Papua, 2 unit IBM di BNNK Jayapura dan 2 unit IBM di BNNK Mimika.

Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional		
No.	Nama Satker	Nama Unit IBM
1.	BNNP Papua	Kampung Skouw Sae
2.	BNNP Papua	Kampung Skouw Yambe
3.	BNNK Jayapura	Kelurahan Hinekombe
4.	BNNK Jayapura	Kelurahan Sentani Kota
5.	BNNK Mimika	Kampung Kamoro Jaya
6.	BNNK Mimika	Kampung Koperapoka

Faktor pendorong IBM terbentuk di Kampung Skow Yambe dan Skow Sae yaitu :

- Dukungan dari Pemerintah Distrik dan Kabupaten dengan adanya pengakuan anggaran yang disampaikan dalam pertemuan koordinasi pembentukan IBM
- Adanya dukungan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda yang ada di Kampung Skow Yambe dan Skow Sae.

Sedangkan hambatannya adalah :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya pecandu/penyalahguna narkoba untuk melaporkan diri
- Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana IBM masih kurang
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan IBM di Kampung.

Adapun untuk IBM di BNNK Mimika adalah Kampung Kamoro Jaya dan Kampung Koperapoka. Sedangkan IBM di BNNK Jayapura adalah Kelurahan Hinekombe dan Kelurahan Sentani Kota faktor pendorongnya adalah :

- adanya dukungan dari perangkat desa mengenai program IBM ini
- Kepala kelurahan bahkan menjadi pembina secara langsung dalam menjalankan program IBM di Kampung/Kelurahan tersebut
- Apresiasi dari warga dan besarnya kepedulian terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan tersebut sehingga program IBM dapat terbentuk dan berjalan dengan baik sejauh ini

Sedangkan hambatannya adalah :

- Tidak terpenuhinya anggaran untuk menjalankan kegiatan IBM sesuai target yg ditetapkan

<b>11</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika</b>
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN*. Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3	3,68	110,5 %

Untuk Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Papua sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 3,33 %. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan nilai sebesar 3.68 % dengan predikat mutu “A” (sangat baik). Capaian target untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110.5 %.

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Satker	IKM	Skala 4	Kategori
1.	Klinik Cenderawasih	BNNP Papua	3,68	3.705	A

12	<p><b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya</b></p>
----	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah berkas perkaratindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21* . Sasaran di atas diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Yang P-21	10 LKN	15 LKN	130 %

Untuk *Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21* sesuai PK 2023 BNNP Papua mendapatkan target 10 berkas perkara dengan rincian BNNP Papua 6 berkas, BNNK Jayapura 2 berkas dan BNNK Mimika 2 berkas. Dari target tersebut BNNP Papua mampu mendapatkan realisasi LKN sebanyak 15 berkas dengan rincian BNNP Papua (9 berkas), BNNK Jayapura (4 berkas) dan BNNK Mimika (2 berkas). Indikator kinerja ini melampaui target atau over prestasi karena meningkatnya peredaran gelap narkotika baik jenis ganja maupun Kristal Metamfetamina (sabu-sabu) di tanah Papua. Dari jumlah kasus narkotika yang P21

tersebut masih didominasi kasus ganja dan beberapa ada kasus sabu-sabu (*methamphetamine*) yang berasal dari luar Papua. Berikut rincian kasusnya :

No.	Satker	Target	P-21
1.	BNNP Papua	6 LKN	9 LKN
2.	BNNK Jayapura	2 LKN	4 LKN
3.	BNNK Mimika	2 LKN	2 LKN
<b>Jumlah</b>		<b>10 LKN</b>	<b>15 LKN</b>

#### Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNP Papua tahun 2023

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNP PAPUA	17/1/2023	LKN/0002-NAR/I/2023/BNNP Papua	ANDERSON LOMO	340,62 Ganja Kering
2.	BNNP PAPUA	19/1/2023	LKN/0003-NAR/I/2023/BNNP Papua	BARO MUHAJIR	267,19 Ganja Kering
3.	BNNP PAPUA	19/1/2023	LKN/0007-NAR/III/2023/BNNP Papua	NATANAEL TJIN DARWAN alias NAEL	196,54 Ganja Kering
4.	BNNP PAPUA	30/3/2023	LKN/0007-NAR/III/2023/BNNP Papua	GAHDAFEY BLENSI alias DAY	4631,49 Ganja Kering
				CALOS VEVA alias CAL	83,93 Ganja Kering
				TONIN HANSLEY alias HANS	596,73 Ganja Kering
5.	BNNP PAPUA	30/3/2023	LKN/0008-NAR/III/2023/BNNP Papua	VINSO DOKO alias VINS	561,64 Ganja Kering
6.	BNNP PAPUA	30/3/2023	LKN/0009-NAR/III/2023/BNNP Papua	JOSWA KINGSTON alias JOS	546,9 Ganja Kering
7.	BNNP PAPUA	4/4/2023	LKN/0010-NAR/III/2023/BNNP Papua	JOHN LAHO alias JIVA	1839,79 Ganja Kering
				SAKIAS LAHO alias DEU	

8.	BNNP PAPUA	17/6/2023	LKN/0012-NAR/VI/2023/BNNP Papua	RIO SUNG JONATHAN alias RIO GIDEON alias DION	1,88 Shabu dan 25 Butir Ekstasi
9.	BNNP PAPUA	13/7/2023	LKN/0015-NAR/VII/2023/BNNP Papua	AMIRUDDIN alias AMIR	1,16 Shabu

#### Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNK Jayapura tahun 2023

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNK JAYAPURA	09 JANUARI 2023	LKN/01/I/2023/BNNK, TANGGAL 09 JANUARI 2023	TOE BARI alias BARI ALEX AWETA alias ALEX	76,79 Ganja Kering
2.	BNNK JAYAPURA	04 JUNI 2023	LKN/02/VI/2023/BNNK, TANGGAL 04 JUNI 2023	KALEP YAKU	16,48 Ganja Kering
3.	BNNK JAYAPURA	27 JUNI 2023	LKN/13/VI/2023/BNNK, TANGGAL 27 JUNI 2023	MAIKHEL RUMSOWEK alias MAIKEL	150 Ganja Kering
4.	BNNK JAYAPURA	27 JUNI 2023	LKN/14/VI/2023/BNNK, TANGGAL 27 JUNI 2023	NIGEL AWUTE	598,84 Ganja Kering

#### Laporan Kasus Narkotika (LKN) yang Diselesaikan (P-21) di BNNK Mimika tahun 2023

No.	Instansi	Tanggal LKN	Nomor Kasus	Tersangka	Barang Bukti
1.	BNNK MIMIKA	13/10/2023	LKN/16/X/2023/BNNK-MMK	Tustianto Alias ASO (L)	Shabu (1,56 Gram)
2.	BNNK MIMIKA	13/03/2023	LKN/06/III/2023/BNNK-MMK	YUSPIN TOPA	Shabu (119,15 Gram)

# 13

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100 %

Dari hasil penilaian internal kami untuk Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, Dan Kesehatan Tahanan di BNNP Papua untuk tahun 2023 ini adalah 100. Hal ini karena sudah tertata rapi SOP Wastahti yang mengatur jadwal besuk jenguk tahanan dan rutin bekerja sama dengan bidang rehabilitasi untuk setiap bulannya tahanan melakukan tes kesehatan di Klinik Cenderawasih BNNP Papua. Disamping itu tahanan saat mau dipindahkan ke Rutan Lapas Narkotika Doyo dilakukan tes HIV di Rumah Sakit Bhayangkara Abepura.

# 14

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika*. Sasaran di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %

Untuk Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika, menurut hasil penilaian internal kami mencapai nilai 100 persen di tahun 2023. Hal ini karena bidang Wastahti BNNP Papua telah memiliki asset Berangkas untuk penyimpanan BB dan senjata. Sehingga meminimalisir terjadinya kehilangan BB atau penyalahgunaan BB oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Disamping itu pemasangan CCTV pada tiap ruang tahanan dan sudut lorong pemberantasan juga memberikan nilai tambah dalam penilaian internal ini.

<b>15</b>	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien</b>
-----------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Papua dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target* yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Kinerja Anggaran	85 %	74,64	87,81

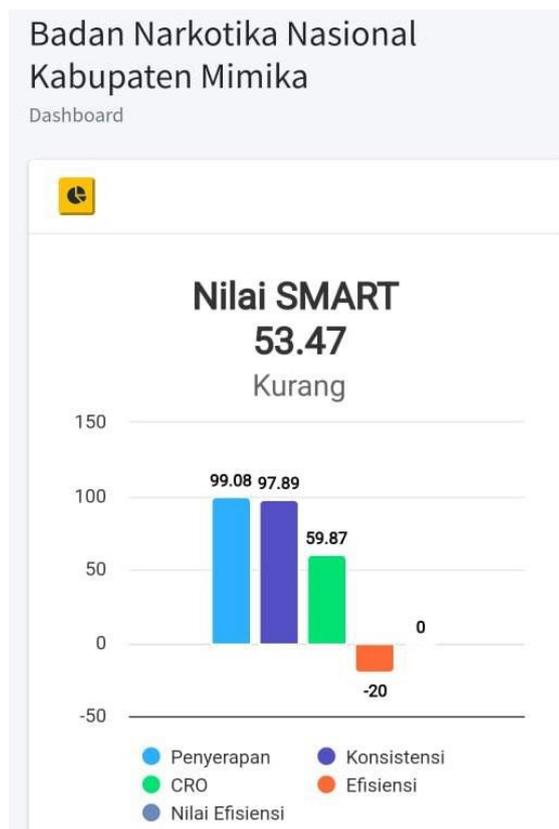
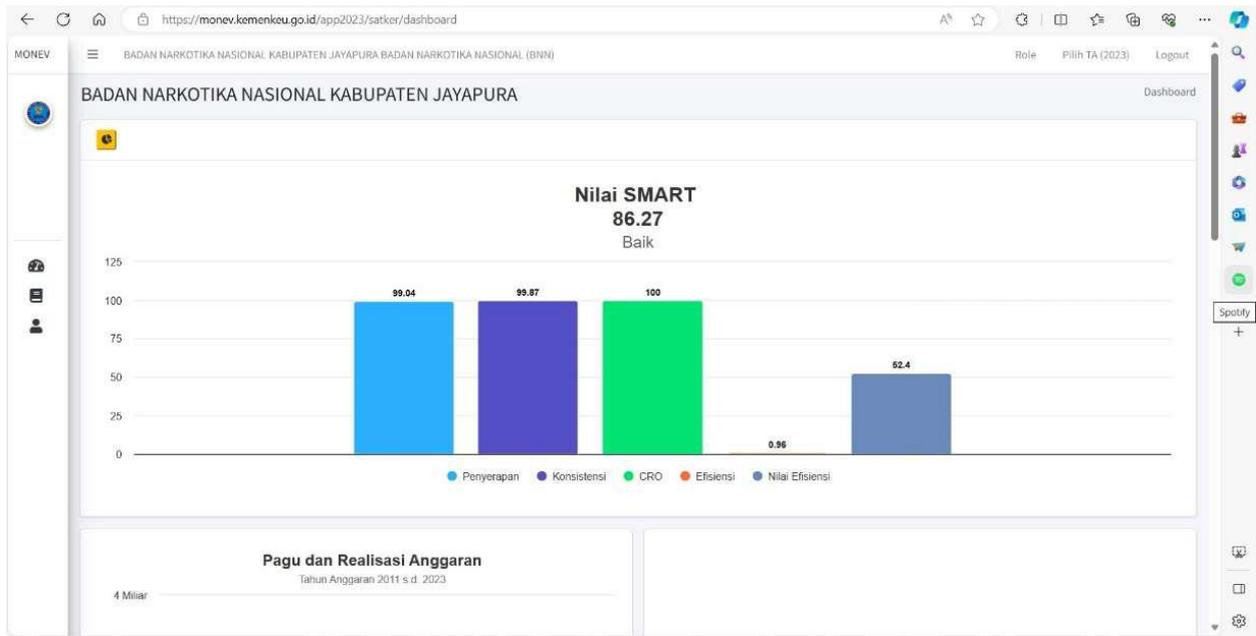


**16 Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target* yang dilihat dari aplikasi SMART Kemenkeu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	1	50 %

Target Nilai Kinerja Anggaran di BNNP Papua dan jajarannya yaitu sebesar 87 %. BNNK Jayapura nilai kinerja anggaran tahun 2023 sebesar 81.45 % sedangkan BNNK Mimika sebesar 86.40 %. Dari hasil penilaian tersebut maka target 2 BNNK Kabupaten/Kota yang nilai kinerja anggarannya minimal mencapai 87 % tidak tercapai tahun 2023.



NO.	SATKER	TARGET NILAI KINERJA ANGGARAN (%)	NILAI SMART 2023 (%)
1.	BNNP Papua	85	74,64
2.	BNNK Jayapura	82	86,27
3.	BNNK Mimika	87	53,47

17	<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur</b>
----	---

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kerjanya adalah *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	T a r g e t	Realisasi	Capaian Target (%)
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Papua	92 %	96.68 %	105 %

Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
100.00	81.66	100.00	0.00	0.00	97.84	100.00	97.59	77.35	80%	96.68
10	10	20	0	0	10	5	25			
10.00	8.17	20.00	0.00	0.00	9.78	5.00	24.40			
90.83		99.28					97.59			

# 18

## Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target yang dilihat dari aplikasi MONEVPA Kemenkeu.*

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Target (%)
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA Mencapai Target	2 BNN Kabupaten/Kota	2 BNN Kabupaten/Kota	100 %

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Papua T.A 2023 yaitu 96.68 dari target 92 %. Sedangkan untuk BNNK Jayapura nilai IKPA nya sebesar 97.17 dan BNNK Mimika sebesar 94.18 dari target pusat sebesar 92 %. Jadi nilai IKPA keseluruhan BNNP Papua dan jajaran telah melebihi target yang ditentukan oleh BNN RI.

NO.	SATKER	TARGET IKPA (%)	NILAI IKPA 2023 (%)
1.	BNNP Papua	92	96.68
2.	BNNK Jayapura	92	97.17
3.	BNNK Mimika	92	94.18

**Nilai IKPA BNNK Jayapura T.A 2023**

Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
88.24	96.84	0.00	0.00	97.40	100.00	100.00	77.73	80%	97.17	
10	20	0	0	10	5	25				
8.62	19.37	0.00	0.00	9.74	5.00	25.00				
1.12	98.08					100.00				

**Nilai IKPA BNNK Mimika T.A 2023**

KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
100.00	89.54	98.65	0.00	0.00	99.86	100.00	86.69	75.34	80%	94.18
10	10	20	0	0	10	5	25			
10.00	8.95	19.73	0.00	0.00	9.99	5.00	21.67			
94.77	99.50					86.69				

**19**

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas indikator kinerjanya adalah *Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal* yang di nilai oleh Inspektorat BNN DAN TPI. Berdasarkan hasil penilaian ZI BNNP Papua mendapatkan rangking 23 dari 34 Provinsi dengan nilai ZI yaitu 71,46. Berikut adalah tabel penilaiannya :

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
16	BNNP Papua Barat	17.53	22.90	34.09	74.52
17	BNNP Lampung	24.12	21.16	28.51	73.79
18	BNNP Aceh	13.19	24.87	35.08	73.14
19	BNNP Jambi	21.04	17.08	34.66	72.78
20	BNNP Bengkulu	18.33	18.18	35.88	72.39
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	17.78	18.21	36.26	72.25
22	BNNP Nusa Tenggara Timur	16.37	19.46	35.69	71.52
23	BNNP Papua	18.43	23.90	29.13	71.46
24	BNNP Riau	23.81	29.37	18.25	71.43
25	BNNP Kalimantan Barat	17.09	18.47	35.86	71.42
26	BNNP Sulawesi Tengah	14.77	22.60	33.98	71.35
27	BNNP Sumatera Barat	20.09	16.75	34.38	71.22
28	BNNP Sulawesi Utara	21.57	22.33	26.88	70.78
29	BNNP Sulawesi Tenggara	18.08	21.18	31.25	70.51
30	BNNP DKI Jakarta	26.26	25.32	18.71	70.29
31	BNNP Maluku	14.73	24.16	31.39	70.28
32	BNNP Kalimantan Utara	14.68	20.52	34.99	70.19
33	BNNP Gorontalo	17.38	18.39	34.38	70.15
34	BNNP Maluku Utara	19.70	20.44	30.00	70.14

## **BAB IV PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governant*) dilingkungan BNN. LAKIP BNNP Papua merupakan hasil kerja BNNP Papua dalam turut serta membangun Negara secara khusus di Provinsi Papua dalam meningkatkan upaya P4GN. Anggaran BNN Provinsi Papua T.A 2022 yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan sebesar **Rp. 7,199,780,000** berasal dari sumber dana APBN *dengan realisasi anggaran sebesar 99.83 % dan realisasi output sebesar 97,59 %*.

### **Saran**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen (ASN dan POLRI) untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN di Tanah Papua.
2. Perlu adanya pembangunan Kantor sendiri milik BNN Provinsi Papua sehingga dapat menunjang kinerja operasional BNN di Tanah Papua.
3. Perlu adanya fasilitas dan kapasitas lembaga Rehabilitasi milik BNN di Tanah Papua sebagai wujud kepedulian BNN Pusat terhadap BNN Provinsi Papua di ujung Indonesia timur.
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.
5. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : NORMAN WIDJAJADI, S.I.K**  
**Jabatan : KEPALA BNNP PAPUA**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si**  
**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KEPALA BNNP PAPUA**

**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si**

**NORMAN WIDJAJADI, S.I.K**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.47 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	85 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	30 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	6 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah unit penyelenggara layanan	6 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	layanan rehabilitasi narkotika	rehabilitasi IBM yang operasional	
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.3 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	85 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

1. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.310.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.130.000.000
3. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.50.000.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.53.230.000
5. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.673.084.000
6. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.261.375.000
7. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.315.348.000
8. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.639.776.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.1.100.000.000

10. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.260.000.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.2.981.722.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.94.432.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.211.774.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.4.881.640.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.67.052.000

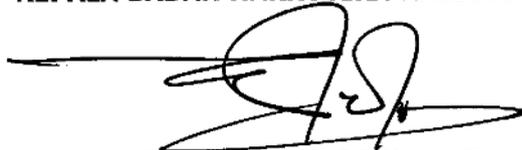
JAKARTA, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,

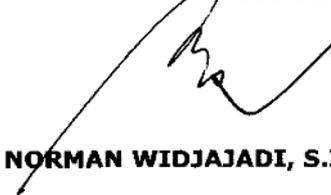
Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**KEPALA BNNP PAPUA**



**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si**



**NORMAN WIDJAJADI, S.I.K**

